



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 11322-11329

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Latar Belakang Politik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Moderasi pada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara

Hasbi Kombih, Eka Nurmala Sari, Zulia Hanum

Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

hasbikombih0@gmail.com, ekanurmalasari@umsu.ac.id, zuliahanum@umsu.ac.id

Abstrak

Pengawasan keuangan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik dikelola secara bertanggung jawab. Tanpa pengawasan yang baik, potensi penyimpangan akan semakin besar dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dan latar belakang politik terhadap pengawasan keuangan daerah dimoderasi transparansi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang berjumlah 30 (tiga puluh) orang dan 1 orang staf ahli setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Sampel dalam penelitian ini di ambil 2 orang disetiap anggota dewan terdirdiri dari anggota dewan dan staf ahli dewan sehingga diperoleh jumlah responden sebanyak 60 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis statistik dengan menggunakan uji Analisis Outer Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini membuktikan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, latar belakang politik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, transparansi memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, transparansi memoderasi pengaruh latar belakang politik terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kabupaten Aceh Tenggara.

Kata kunci: Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Latar Belakang Politik, Transparansi, Keuangan Daerah

1. Latar Belakang

Perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Tuntutan ini perlu dipenuhi dan didasari langsung oleh para manajer pemerintah daerah. Seiring dengan PP No. 105/2000 yang diganti menjadi PP No. 58/2005 mensyaratkan perlu diberlakukannya pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam bentuk laporan keuangan (neraca daerah, arus kas dan realisasi anggaran) oleh kepala daerah. Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah.

Pengawasan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) (PP No. 105 Tahun 2000). Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Dalam rangka mewujudkannya, terlaksananya penyelenggaraan daerah yang baik, yaitu yang transparan dan akuntabel, efektif dan efisien, serta profesional dan bertanggungjawab.

Pengawasan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktornya yaitu pengetahuan dari anggota dewan tentang anggaran. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran sangat diperlukan dalam

Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Latar Belakang Politik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Moderasi pada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara

pengawasan keuangan daerah, karena anggota dewan harus memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang anggaran agar seluruh anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran tentang anggaran [1]. Pengetahuan dewan tentang anggaran ini berasal dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan. Pengetahuan dewan tentang anggaran juga berkaitan dengan pengetahuan dewan tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengetahuan tentang anggaran sangat diperlukan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Anggota DPRD harus memiliki pengetahuan mengenai anggaran yang banyak mengenai APBD. Selain itu anggota DPRD juga harus memiliki pengetahuan mengenai pengawasan keuangan daerah.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu mendapatkan hasil penelitian yang berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh [2], [3] dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [4], [5] dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah adalah latar belakang politik. Latar belakang politik merupakan pengalaman seseorang yang berkarir di dunia politik yang mana, disini adalah anggota DPRD. Orang yang memiliki pengalaman di bidang politik akan cenderung sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena telah memiliki banyak pengalaman yang didapatkan saat berada dalam organisasi sebelumnya. Latar belakang politik merupakan pedoman bagi anggota DPRD dalam menjalankan perannya khususnya yaitu pengawasan keuangan daerah. Setiap anggota dewan memiliki latar belakang politik yang berbeda didalamnya. Berbicara mengenai politik, tentu saja tidak lepas dari partai politik. Partai politik dan parlemen (legislatif) merupakan dua faktor utama yang memperoleh mandat dari masyarakat sipil, berperan mengorganisir kekuasaan dan meraih kontrol atas negara untuk kepentingan masyarakat. Ketika pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), partai politik (partai) berperan sebagai institusi yang menyeleksi, menganalisa dan menentukan pencalonan para pasangan kepala daerah, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), serta para anggota calon legislatif di pusat dan daerah, sebelum menghadapi pemilu dan pilkada untuk dipilih oleh rakyat [6].

Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai menurut [7]–[9] dalam penelitiannya membuktikan bahwa political background berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Selain itu, hasil penelitian dari [6], [10] menunjukkan bahwa latar belakang politik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan.

Kebaruan penelitian ini adalah adanya penambahan variabel transparansi kebijakan publik yang dimana transparansi kebijakan publik adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Semakin seorang DPRD menerapkan atau melakukan keterbukaan tentang anggaran maka tidak ada pandangan buruk masyarakat terhadap anggaran tersebut [2], maka dari itu di penelitian ini menambahkan variabel transparansi kebijakan public sebagai variabel moderasi.

Penelitian yang dilakukan oleh [8], [11] menyimpulkan bahwa transparansi memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah secara signifikan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh [12] [13] menyimpulkan transparansi kebijakan publik tidak memoderasi terhadap interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian. Sehingga perlu ditelaah lebih dalam variabel-variabel yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Dalam penelitian ini variabel yang mempengaruhi peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah antara lain: political background dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dan menambah variabel moderasi yaitu transparansi kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pendekatan teori peran bahwa seorang individu dapat berperilaku sesuai dengan peran yang sedang dijalani. Kaitannya dengan tugas seorang anggota dewan, anggota dewan harus memahami perannya dalam hal ini peran yang dimaksud adalah tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawasan keuangan daerah (APBD). Untuk menjalankan tugasnya dalam mengawasi keuangan daerah dengan baik anggota dewan harus mengetahui mekanisme anggaran mulai dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata kelola keuangan daerah, proses penyusunan anggaran, sampai pada tahap pertanggungjawaban. Pengetahuan dewan tentang anggaran sangat erat kaitannya dengan kinerja sebagai pengawasan keuangan daerah. Semakin luas pemahaman tentang anggaran oleh anggota dewan maka semakin baik pula kualitas kinerja anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD). Dengan pengetahuan anggaran yang luas maka anggota dewan dapat mengontrol jalannya APBD dengan baik dan meminimalisir terjadi kecurangan [2].

Dalam penelitian sebelumnya yang menguji hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan peran anggota DPRD dalam mengawasi keuangan daerah (APBD), seperti yang dilakukan oleh [2], [3] dalam penelitiannya membuktikan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah

H₁ : Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Political Background merupakan latar belakang dari pengalaman seseorang dalam berkecimpung di dunia politik. Setiap lembaga (DPRD) memiliki political background seperti individu yang ada di dalamnya. Karakteristik utama dari political background adalah terkait dengan nilai. Nilai merupakan prinsip dasar yang dijadikan sebagai pedoman hidup individu

Teori peran menyebutkan bahwa seorang individu dapat berperilaku sesuai dengan peran yang sedang dijalani. Setiap peran berhubungan dengan identitas yang menggambarkan individu tersebut dalam bertindak dalam suatu organisasi atau kelompok. Kaitannya dengan tugas seorang anggota dewan dalam mengawasi keuangan daerah, anggota dewan harus berperilaku sesuai dengan tanggungjawab dan tugas yang sedang dijalani. Artinya, anggota dewan harus berperilaku sesuai dengan tanggungjawab dan tugas yang sedang dijalankan. Dalam menjalankan tugasnya seorang anggota dewan dipengaruhi oleh political background. Political background tersebut meliputi: Pengalaman politik dan latar belakang partai politik. Semakin seorang anggota DPRD memiliki political background yang lebih baik maka pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah (APBD) akan semakin berkualitas dan baik [2].

Dalam beberapa penelitian [7]–[9] dalam penelitiannya membuktikan bahwa political background berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

H₂ : Political Background Berpengaruh Positif Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Transparansi merupakan salah satu prinsip dari good governance. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Semakin transparan kebijakan publik yang dalam hal ini adalah APBD maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut [11].

Peran masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah sangatlah penting karena tidak sedikit kebutuhan dan hak masyarakat yang ditentukan dan diperjuangkan oleh DPRD. Aspirasi masyarakat dapat diserap oleh Anggota DPRD melalui berbagai jalur dan sumber yang berbeda-beda, salah satunya dapat melalui jaringan aspirasi via internet, media, pertemuan langsung atau bahkan sampai dengan demonstrasi serta hearing dengan masyarakat. Berdasarkan peraturan kedewanan, setiap anggota DPRD diberikan kesempatan untuk menyerap aspirasi masyarakat dengan bertemu langsung melalui sebuah kegiatan yang disebut dengan *reses*. Dalam kegiatan tersebut masyarakat dapat ikut berpartisipasi menyampaikan aspirasi, keinginan, keluhan, harapan bahkan kebutuhannya kepada Anggota DPRD guna menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan anggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat menjadi fungsi pengawasan yang sangat baik jika bekerjasama dengan para wakil rakyat yang dapat dilakukan dengan aktif memberikan saran, informasi dan kritik membangun kepada Anggota DPRD untuk disampaikan kepada pemerintah. Pemerintah baik eksekutif dan legislatif harus lebih proaktif dan lebih

perhatian lagi untuk dapat meningkatkan pengetahuan mereka terkait anggaran dan meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat untuk dapat aktif dalam proses pengawasan keuangan daerah [14].

Dengan adanya transparansi kebijakan publik serta dukungan oleh keterlibatan masyarakat akan sangat menunjang pengetahuan anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan APBD, terutama dalam mengidentifikasi adanya pemborosan atau kegagalan di dalam pelaksanaan kegiatan/proyek pembangunan pada anggaran tahun berjalan sesuai secara rinci hingga pada akhirnya efektivitas pengawasan APBD yang dijadikan oleh DPRD dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, jika semakin tinggi penyelenggaraan kebijakan publik di daerah, maka semakin menunjang pengetahuan anggota dewan dalam mendeteksi terjadinya kebocoran/kegagalan anggaran, sehingga pada akhirnya pelaksanaan fungsi pengawasan anggaran daerah oleh DPRD akan menjadi semakin optimal (Permatasari, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh [8], [11] menyimpulkan bahwa transparansi memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah secara signifikan.

H₃ : Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Berpengaruh Positif Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dimoderasi Oleh Transparansi Publik

Perbedaan partai politik dan tujuan politik masing-masing anggota DPRD akan semakin meningkatkan persaingan antara politisi yang menduduki jabatan sebagai anggota DPRD. Persaingan politik yang tinggi ini memiliki pengaruh terhadap kinerja pada anggota DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Pengalaman politik dan berorganisasi anggota DPRD yang rendah akan mempengaruhi bargaining position dalam menentukan arah pembangunan dan pengawasan [15].

Partisipasi aktif masyarakat yang dapat mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD yaitu dengan aktif mengumpulkan informasi dan menyampaikannya kepada anggota DPRD pada saat melakukan reses, dengar pendapat (hearing) masyarakat dan tokoh-tokoh adat maupun pada saat anggota DPRD melakukan kunjungan kerja. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh masyarakat, DPRD mempunyai hak dan wewenang untuk menindaklanjuti dengan cara memanggil kepala daerah dan instansi teknis untuk menanyakan kendala-kendala yang terjadi dilapangan sebagai bentuk dan wujud dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pengelolaan keuangan [15].

Penelitian yang dilakukan oleh penelitian [8], [9] menunjukkan bahwa *Political Backgroud* berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

H₄ : Latar Belakang Politik Berpengaruh Positif Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dimoderasi Oleh Transparansi Publik

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode asosiatif kuantitatif, dengan menggunakan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara yang berjumlah 30 orang. Teknik digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan sampel jenuh dimana semua anggota populasi dijadikan sampel sehingga jumlah sampel dalam penelitian berjumlah 30 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tenggara. Pada penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner *hardcopy* dengan menggunakan skala pengukuran likert 5 poin untuk mengukur variabel-variabel penelitian. Data pengisian kuesioner akan di rekap untuk mengetahui jawaban yang akan di olah untuk kemudian dengan menggunakan SmartPLS (*Partial Least Square*) akan dilakukan analisis dengan *Partial Least Square- Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan menggunakan uji Analisis Outer Model, Analisis Inner Model, dan Uji Hipotesis.

3. Hasil dan Diskusi

Analisis Outer Model

Statistik yang digunakan dalam *composite reliability* atau reabilitas konstruk adalah cronbach's alpha dan D.G rho (PCA). Berikut adalah nilai *Construct Reliability and Validity* yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Hasil Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
Latar Belakang Politik	0.916	0.932	0.632
Pengawasan Keuangan	0.952	0.959	0.698
Pengetahuan	0.915	0.934	0.703
Transparansi	0.915	0.931	0.628

Sumber : Hasil Pengolahan Data PLS

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* untuk latar belakang politik sebesar 0,932; pengawasan keuangan daerah sebesar 0,959; pengetahuan anggaran sebesar 0,934, dan untuk transparansi anggaran sebesar 0,931. Nilai *cronbach's alpha* untuk latar belakang politik sebesar 0,916; pengawasan keuangan daerah sebesar 0,952; pengetahuan anggaran sebesar 0,915, dan untuk transparansi anggaran sebesar 0,915. Keempat laten memperoleh nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* diatas 0,6 sehingga dapat dikatakan seluruh faktor memiliki reabilitas atau keterandalan yang baik sebagai alat ukur. Selanjutnya nilai AVE untuk latar belakang politik sebesar 0,632; pengawasan keuangan daerah sebesar 0,698; pengetahuan anggaran sebesar 0,703, dan untuk transparansi anggaran sebesar 0,628. Keempat variabel memiliki AVE yang berada diatas 0,5 sehingga konstruk memiliki *convergent validity* yang baik dimana variabel laten dapat menjelaskan rata-rata lebih dari setengah *variance* dari indikator-indikatornya.

Discriminant validity yang baik akan mampu menjelaskan variabel indikatornya lebih tinggi dibandingkan dengan menjelaskan varian dari indikator konstruk yang lain. Berikut adalah nilai *discriminant validity* untuk masing-masing indikator.

Tabel 2 Discriminant Validity

	Latar Belakang Politik	Pengawasan Keuangan	Pengetahuan	Transparansi
X1.1			0.810	
X1.2			0.791	
X1.3			0.883	
X1.4			0.865	
X1.5			0.868	
X1.6			0.809	
X2.1	0.781			
X2.2	0.772			
X2.3	0.771			
X2.4	0.827			
X2.5	0.831			
X2.6	0.815			
X2.7	0.837			
X2.8	0.718			
Y1.1		0.839		
Y1.10		0.819		
Y1.2		0.882		
Y1.3		0.854		
Y1.4		0.871		
Y1.5		0.867		
Y1.6		0.837		
Y1.7		0.835		
Y1.8		0.737		
Y1.9		0.806		
Z1.1				0.813
Z1.2				0.695
Z1.3				0.768

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7021>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Z1.4				0.788
Z1.5				0.837
Z1.6				0.815
Z1.7				0.833
Z1.8				0.781

Sumber : Hasil Pengolahan Data PLS

Berdasarkan tabel 2 di atas diketahui bahwa nilai *outer loading* pada setiap indikator adalah lebih dari 0,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dan indikator yang digunakan dalam penelitian adalah valid.

Uji Inner Model

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program smartPLS 3.0, diperoleh nilai *R-Square* yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Hasil Uji R-Square

	R Square	Adjusted R Square
Pengawasan Keuangan	0.920	0.916

Sumber : Hasil Pengolahan Data PLS

Dari tabel di atas 3 diketahui bahwa pengaruh pengetahuan anggaran dan latarbelakang politik terhadap pengawasan keuangan daerah dengan nilai r-square 0,920 mengindikasikan bahwa variasi nilai pengawasan keuangan daerah mampu dijelaskan oleh variasi nilai pengetahuan anggaran dan latarbelakang politik sebesar 92% atau dengan kata lain bahwa model tersebut adalah substansial (kuat), dan 8% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengujian Hipotesis

Hasil uji hipotesis pengaruh langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada tabel *path coefficient* berikut ini :

Tabel 4 Path Coefficient

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Latar Belakang Politik -> Pengawasan Keuangan	0.483	0.472	0.108	4.466	0.000
Moderating Effect 1 -> Pengawasan Keuangan	0.203	0.191	0.061	3.343	0.001
Moderating Effect 2 -> Pengawasan Keuangan	0.185	0.170	0.059	3.157	0.002
Pengetahuan -> Pengawasan Keuangan	0.260	0.269	0.083	3.131	0.002

Sumber : Hasil Pengolahan Data PLS

Kriteria pengujian adalah tolak H_0 jika $t \text{ hitung} > \alpha = 0.05$ atau $P \text{ value} < \alpha = 5\%$ atau 0.05. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa : Nilai t statistic untuk pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) sebesar 3.131 dan nilai Pvalue sebesar 0.002 . Jika dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0.05$, maka $0.002 < \alpha = 0.05$ sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). Besarnya pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) sebesar 0.260. Nilai t statistic untuk latar belakang politik (X2) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) sebesar 4.466 dan nilai Pvalue sebesar 0.000 . Jika dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0.05$, maka $0.000 < \alpha = 0.05$ sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan dari latar belakang politik (X1) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). Besarnya pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) sebesar 0.483. Nilai t statistic untuk pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) terhadap pengawasan keuangan

daerah (Y) dimoderasi transparansi sebesar 3.343 dan nilai Pvalue sebesar 0.001. Jika dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0.05$, maka $0.001 < \alpha = 0.05$ sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan transparansi memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran (X1) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y). Nilai t statistic untuk latar belakang politik (X2) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y) dimoderasi oleh transparansi sebesar 3.157 dan nilai Pvalue sebesar 0.000. Jika dibandingkan dengan nilai $\alpha = 0.05$, maka $0.002 < \alpha = 0.05$ sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan transparansi memoderasi latar belakang politik (X1) terhadap pengawasan keuangan daerah (Y).

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima sehingga terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan anggota dewan tentang anggaran mampu meningkatkan pengawasan keuangan daerah pada kabupaten Aceh Tenggara, dimana dengan pengetahuan dewan tentang anggaran yang cukup maka anggota dewan akan lebih mudah untuk mengawasi keuangan daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian [2], [3] dalam penelitiannya membuktikan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah..

Pengaruh Latar Belakang Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima sehingga terdapat pengaruh positif signifikan antara variabel latar belakang politik terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang politik mampu meningkatkan pengawasan keuangan daerah pada kabupaten Aceh Tenggara, dimana dengan latar belakang politik yang cukup maka anggota dewan akan lebih mudah untuk mengawasi keuangan daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian [7]–[9] dalam penelitiannya membuktikan bahwa political background berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dimoderasi Oleh Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima sehingga transparansi public memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi kebijakan public mampu memperkuat hubungan anatar pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dimana kemajuan pesat teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas dijadikan sarana pendukung transparansi kebijakan publik, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif akan tetapi dewan dalam merespon transparansi kebijakan publik yang dilakukan lembaga eksekutif berbeda-beda, sehingga akses terhadap informasi kebijakan publik dapat diakses setiap masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh [8], [11] menyimpulkan bahwa transparansi memoderasi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah secara signifikan.

Pengaruh Latar Belakang politik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dimoderasi Oleh Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis keempat diterima sehingga transparansi publik memoderasi pengaruh latar belakang politik terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi kebijakan public mampu memperkuat hubungan anatar latar belakang politik terhadap pengawasan keuangan daerah dimana dewan yang memiliki latar belakang politik yang berbeda-beda sehingga dalam merespon transparansi kebijakan publik tersebut dilakukan lembaga eksekutif berbeda-beda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian [8], [9] menunjukkan bahwa *Political Background* berpengaruh positif terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Latar belakang politik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Transparansi kebijakan public memoderasi pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Transparansi kebijakan public memoderasi pengaruh latarbelakang politik terhadap pengawasan keuangan daerah pada DPRK Kabupaten Aceh Tenggara. Rekomendasi terkait temuan empiris menunjukkan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan staf ahli anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten agar dapat mengikuti pelatihan terkait dengan anggaran keuangan daerah, selain itu dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Selain itu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) agar kedepannya untuk meningkatkan political background yang baik, selalu mengedepankan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan meningkatkan pengetahuan tentang anggaran serta melibatkan masyarakat dalam proses penganggaran.

Referensi

- [1] R. Arvitaningrum and A. Taman, "Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Dan Persepsi Anggota Dewan Tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan APBD Di Kabupaten Klaten," *Nominal Barom. Ris. Akunt. dan Manaj.*, vol. 8, no. 2, pp. 224–238, 2019.
- [2] M. A. M. Aryastuti and I. D. N. Wiratmaja, "Political Background, Transparansi Kebijakan Publik, Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 34, no. 5, pp. 1250–1262, 2024.
- [3] S. R. Dewi, K. Sinduwiatno, and S. Biduri, "Board of Knowledge about Budgeting Regional Financing (APBD) in Sidoarjo," *J. Econ. Business, Gov. Challenges*, vol. 2, no. 2, pp. 110–118, 2019.
- [4] R. Indriani, J. Sukraini, and S. Y. Defitri, "Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Latar Belakang Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dprd Kabupaten Solok Dan Dprd Kota Solok Periode 2019-2024)," *Optim. J. Ekon. dan Manaj.*, vol. 2, no. 3, pp. 318–338, 2022.
- [5] I. Sari, "Pengaruh Personal Background dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Kinerja DPRD Kota Padang Dalam Pengawasan Keuangan Daerah," *Maj. Sainstekes*, vol. 4, no. 2, pp. 050–058, 2017.
- [6] D. U. Sari, "Pengaruh Personal Background, Political Background Dan Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten Solok)," *J. Akunt.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–25, 2016.
- [7] H. Sofi, M. Mranani, and Y. D. Pramita, "Pengaruh personal background, political background, pengetahuan anggaran dan akuntabilitas terhadap peran anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam pengawasan keuangan daerah (studi empiris pada DPRD kabupaten dan kota Magelang)," *Borobudur Account. Rev.*, vol. 2, no. 2, pp. 123–137, 2022.
- [8] E. Arianti, "Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Political Background, Akuntabilitas Publik dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Pelalawan)," *JOM Fekom*, vol. 4, no. 1, pp. 1297–1309, 2017.
- [9] J. Juanda and C. P. Balqisa, "Analysis of Factors Affecting the Capability of the DPRK Board Members in Financial Supervision (Study on Banda Aceh Local Parliament (DPRK Banda Aceh))," *Res. J. Financ. Account.*, vol. 10, no. 8, pp. 181–189, 2019.
- [10] M. Ronsumbre, S. Werimon, and H. Sudarwadi, "Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah," *J. Fisc. Reg. Econ. Stud.*, vol. 2, no. 1, pp. 58–68, 2019.
- [11] I. Coryanata, "Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah," *J. Akunt. dan Investasi*, vol. 12, no. 2, pp. 110–125, 2012.
- [12] D. Saraswati, "Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada Dprd Kota Jambi)," *J. Ris. Akunt. Jambi*, vol. 2, no. 1, pp. 1–9, 2018.
- [13] D. Ramdhani, "Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah Studi Empiris Di Dprd Kabupaten Serang Banten," *J. Akunt.*, vol. 18, no. 2, pp. 302–321, 2014.
- [14] A. R. Alatas, R. Risman, and A. M. Morad, "Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating," *Econ. Depos. J.*, vol. 4, no. 1, pp. 255–267, 2022.
- [15] Y. Deisyi, M. Asnawi, and A. M. A. Simanjuntak, "Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Latar Belakang Politik Terhadap Pengawasan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Pemoderasi," *J. Akuntansi, Audit Aset*, vol. 2, no. 2, pp. 131–139, 2019.